

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2018 DAN 31 Desember 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2018		% thd Angg	31 Desember 2017
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	354,130,094	0.00	2,149,669,052
JUMLAH PENDAPATAN		-	354,130,094	0.00	2,149,669,052
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	5,112,436,000	5,065,512,567	99.08	4,322,118,641
Belanja Barang	B.4	18,468,477,000	15,090,809,443	81.71	329,089,652,094
Belanja Modal	B.5	157,330,000	157,232,000	99.94	268,208,000
Pinjaman dan Hibah	B.6		-	0.00	-
Belanja Barang	B.7			#DIV/0!	
JUMLAH BELANJA		23,738,243,000	20,313,554,010	85.57	333,679,978,735

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN PER 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.5	444,561,596	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR	C.6	(2,222,808)	-
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto)	C.7	442,338,788	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	257,751	257,751
Jumlah Aset Lancar		442,596,539	257,751
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan TP/TGR	C.11	444,561,595	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	C.13	(2,162,308)	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		442,399,287	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	5,569,394,968	2,335,230,468
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	433,180,000	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(2,176,765,571)	(1,597,130,825)
Jumlah Aset Tetap		3,825,809,397	738,099,643
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	3,814,800	3,814,800
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(3,814,800)	(3,814,800)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		4,710,805,223	738,357,394
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	21,784,940	48,547,795
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Hibah Yang belum di Sahkan	C.28	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		21,784,940	48,547,795
JUMLAH KEWAJIBAN		21,784,940	48,547,795
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	4,689,020,283	689,809,599
JUMLAH EKUITAS		4,689,020,283	689,809,599
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		4,710,805,223	738,357,394

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2018 DAN 31 Desember 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	31 Desember 2018	31 Desember 2017
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	1,875,901,172
JUMLAH PENDAPATAN		-	1,875,901,172
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	5,039,235,367	4,333,155,841
Beban Persediaan	D.3	1,392,123,520	508,737,885
Beban Barang dan Jasa	D.4	7,129,889,921	321,541,697,510
Beban Pemeliharaan	D.5	158,390,950	24,758,929
Beban Perjalanan Dinas	D.6	5,147,819,340	710,973,583
Beban Barang untuk Diserahkan kepada	D.7		
Beban Bantuan Sosial	D.8		
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	579,634,746	333,705,353
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	4,385,116	-
JUMLAH BEBAN		19,451,478,960	327,453,029,101
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(19,451,478,960)	(325,577,127,929)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		143,196,725	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1,103,079,660	281,134,530
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		3,307,000	4,626,560
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		1,099,772,660	276,507,970
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		1,242,969,385	276,507,970
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(18,208,509,575)	(325,300,619,959)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2018 DAN 31 Desember 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017
EKUITAS AWAL	E.1	689,809,599	386,591,449,328
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(18,208,509,575)	(325,300,619,959)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	(59,063,603,574)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	E.3.1	-	-
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.2	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.3	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.4	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.5	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.6	-	(59,063,603,574)
JUMLAH		-	(59,063,603,574)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	22,207,720,259	(1,537,416,196)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	3,114,472,609	(385,874,477,685)
EKUITAS AKHIR	E.6	4,689,020,283	689,809,599

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta adalah salah satu entitas di bawah Komisi Pemilihan Umum yang didirikan untuk memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan factor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jl. Salemba Raya No.15 Jakarta Pusat.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, berkomitmen dengan visi *“sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas , professional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia .”*

Untuk mewujudkannya visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 5 (lima) rencana strategis

sebagai berikut :

- Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.
- Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil , akuntabel, edukatif dan beradab;
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien, dan efektif;
- Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis

Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumberdaya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan

berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran

untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan

mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset

kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan pegawai/mutasi pegawai dari luar KPU Prov. DKI Jakarta, kenaikan tunjangan kinerja. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2018	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0	-
Pendapatan Lain-lain	0	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	5,112,436,000	5,065,512,567
Belanja Barang	18,468,477,000	15,090,809,443
Belanja Modal	157,330,000	157,232,000
Belanja Barang (Pinjaman dan Hibah)	0	0
Jumlah Belanja	23,738,243,000	20,313,554,010

*Realisasi
Pendapatan
Rp354.130.094*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Anggaran lain-lain sebesar Rp354.130.094 merupakan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu dan Pendapatan Pemindahtanganan BMN yang diakui sebagai pendapatan KPU Provinsi DKI Jakarta untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

URAIAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
		1,875,901,172	
Pendapatan Pemindahtanganan BMN	143,196,725	0	
Penerimaan kembali belanja TA yang lalu	210,933,369	273,767,880	
Jumlah	354,130,094	2,149,669,052	(84)

Realisasi Belanja
Negara
Rp20.313.554.010

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Semester II TA 2018 adalah sebesar Rp20.313.554.010 atau sebesar 99,87 % dari anggaran belanja sebesar Rp23.738.243.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II 2018

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	5,112,436,000	5,065,512,567	99.08
Belanja Barang	18,468,477,000	15,090,809,443	81.71
Belanja Modal	157,330,000	157,232,000	99.94
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	23,738,243,000	20,313,554,010	85.57
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	23,738,243,000	20,313,554,010	85.57

Dibandingkan dengan TA 2017, Realisasi Belanja Semester II 2018 mengalami penurunan sebesar 93,91 % dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Semester II TA 2018 dan Semester II TA 2017

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2018	REALISASI 31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	5,065,512,567	4,322,118,641	17.20
Belanja Barang	15,090,809,443	2,247,780,099	571.37
Belanja Modal	157,232,000	268,208,000	(41.38)
Belanja Barang (Pinjaman d	-	326,841,871,995	
Jumlah	20,313,554,010	333,679,978,735	(93.91)

Belanja Pegawai
Rp5.065.512.567

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.065.512.567

dan Rp4.322.118.641. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja Semester II TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 17,20 % persen dari Semester I TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya Kenaikan Pangkat beberapa Pegawai dan Kenaikan Gaji Berkala beberapa pegawai KPU Prov.DKI Jakarta.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai Transito	3,242,573,401	2,680,269,198	20.98
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	1,822,939,166	1,631,853,443	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	-	9,996,000	-
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja	5,065,512,567	4,322,118,641	17.20

Belanja Barang
Rp15.090.809.443

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp15.090.809.443 dan Rp2.247.780.099. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar 571% dari Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2017.

*Perbandingan Belanja Barang Semester II TA 2018
dan Semester II TA 2017*

URAIAN	REALISASI Semester II TA 2018	REALISASI Semester II TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	15,090,809,443	2,247,780,099	571
Belanja Barang Non Operasional	0	0	#DIV/0!
Belanja Jasa	-	-	#DIV/0!
Belanja Pemeliharaan	0	0	#DIV/0!
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	0	0	#DIV/0!
Belanja Barang (pinjaman dan hibah)			#DIV/0!
Belanja Perjalanan Luar Negeri			
Jumlah Belanja Kotor	15,090,809,443	2,247,780,099	571
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	15,090,809,443	2,247,780,099	571

*Belanja Modal
Rp157.232.000*

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp157.232.000 dan Rp268.208.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar 99,90% dibandingkan per 31 Desember 2017 disebabkan oleh anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang di terima dari KPU RI memang lebih kecil dari tahun sebelumnya.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI DESEMBER 2018	REALISASI DESEMBER 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	157,232,000	268,208,000	0.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	157,232,000	268,208,000	
Pengembalian	0	0	
Jumlah Belanja	157,232,000	268,208,000	0.00

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp157.232.000*

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp157.232.000 mengalami penurunan sebesar 45,44 % bila dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2017 sebesar Rp288.208.000. Hal ini dikarenakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang diterima dari KPU RI lebih kecil dari tahun sebelumnya.

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Peralatan dan Mesin	157,232,000	288,208,000	(45.44)
Jumlah Belanja	157,232,000	288,208,000	(45.44)

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017.

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017.

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017.

*Belanja Bantuan
Sosial Rp0*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Tidak terdapat realisasi Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp.0,-*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Tidak terdapat Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017. yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Tidak terdapat saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Kas Lainnya dan Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Piutang PNB Rp0

C.4. Piutang PNB

Tidak terdapat saldo Piutang PNB per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp444.561.596,-*

C.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Terdapat saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp444.561.596 dan Rp0. Merupakan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) KPU Kota Jakarta Utara terkait Dana Pemilihan Gubernur Tahun 2016 .

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih – Piutang
Lancar
(Rp2.222.808)*

C.6 Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang

Terdapat nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar (Rp2.222.808) dan Rp0.

*Bagian Lancar TPA
Rp444.338.788,-*

C.7 Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

Terdapat saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp444.338.788 dan Rp0.

*Belanja Dibayar di
Muka Rp0*

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Tidak terdapat saldo Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017.

*Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima Rp. 0,-*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Tidak terdapat saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Persediaan
Rp.257.751,-

C.10 Persediaan

Terdapat Nilai Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp257.751 dan Rp257.751.

*Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan
per 31 Desember 2017*

URAIAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Bahan Baku Logistik	257,751	257,751	0
Jumlah	257,751	257,751	0

Tagihan TP/TGR
Rp444.561.595,-

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Terdapat Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp444.561.595,- dan Rp0.

Tagihan Penjualan
Angsuran
Rp0

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Tidak Terdapat Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017.

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
(Rp2.162.308)

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TP/TGR

Terdapat Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 adalah sebesar (Rp2.162.308) dan Rp0.

Tanah
Rp. 0

C.14 Tanah

Tidak terdapat nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017.

Tanah tempat kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta adalah tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang di pinjam pakai kan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor:1330 Tahun 2016 tanggal 24 Mei 2016 dan Perjanjian Tambahan (Addendum) Nomor;279/KPU-PROV-010/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemprov DKI Jakarta berupa Tanah dan Bangunan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta.

Peralatan dan
Mesin
Rp5.569.394.968

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 adalah Rp25.569.394.968 dan Rp2.335.230.468 Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	5,569,394,968
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	433,180,000
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2018	6,002,574,968
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	(2,176,765,571)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	3,825,809,397

*Gedung dan
Bangunan
Rp0*

C.16 Gedung dan Bangunan

Tidak terdapat nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017. Gedung dan Bangunan kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta adalah tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang di pinjam pakai kan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor:1330 Tahun 2016 tanggal 24 Mei 2016 dan Perjanjian Tambahan(Addendum)Nomor;279/KPU-PROV-0/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Pemanfatan Barang Milik Daerah Pemprov DKI Jakarta berupa Tanah dan Bangunan kepada KPU Provinsi DKI Jakrta.

*Jalan,Jaringan dan
Irigasi Rp0*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tidak terdapat saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017.

*Aset Tetap Lainnya
Rp433.180.000*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Terdapat saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 adalah Rp.433.180.000 dan Rp0

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Tidak terdapat saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp2.176.765.571)*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing (Rp2.176.765.571) dan (Rp1.597.130.825))

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2018*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	5,569,394,968	2,176,765,571	3,392,629,397
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	433,180,000	0	433,180,000
Akumulasi Penyusutan		6,002,574,968	2,176,765,571	3,825,809,397

*Aset Tak Berwujud
Rp0*

C.21 Aset Tak Berwujud

Tidak terdapat saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per Tetap per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017.

*Aset Lain-Lain
Rp3.814.800*

C.22 Aset Lain-Lain

Terdapat saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 adalah Rp.3.814.800 dan Rp0. Aset lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp(3.814.800)*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Terdapat saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Tetap per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp(3.814.800) dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp(3.814.800).

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra aset akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Uang Muka dari KPPN Rp0

C.24 Uang Muka dari KPPN

Tidak Terdapat Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp21.784.940

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp21.784.940 dan Rp48.547.795 . Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

URAIAN JENIS KEWAJIBAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Uang Makan Bulan Desember 2017 Yang Belum Dibayarkan		21,128,000	
Kekurangan Tukin Bulan Januari-Desember 2017		5,149,200	
Langganan Listrik Bulan Desember 2018 Yang Belum Dibayarkan	21,784,940	22,270,595	-
Jumlah Kewajiban	21,784,940	48,547,795	(55.13)

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka Rp. 0

Tidak Terdapat Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan

yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

*Beban yang Masih
Harus Dibayar
Rp0*

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Tidak ada beban yang masih harus dibayar per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp0 dan Rp0 merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

*Ekuitas
Rp4.689.020.283,-*

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp4.689.020.283 dan Rp689.809.599 .

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan PNBP
Rp0*

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0 dan Rp1.875.901.172.

Rincian Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

URAIAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Setoran dana kampanye pasangan calon diakui sebagai pendapatan	0	1,875,901,172	(100)
Penerimaan kembali belanja TA yang lalu	-	-	#DIV/0!
Jumlah	0	1,875,901,172	(100)

*Beban Pegawai
Rp5.039.235.367*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.039.235.367 dan Rp4.333.155.841.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017

URAIAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	1,190,700,600	1,110,169,400	7
Beban Tunjangan-tunjangan	581,110,566	527,572,043	10
Beban Pegawai dan Vakasi	3,267,424,201	2,685,418,398	
Beban Lembur		9,996,000	
Jumlah	5,039,235,367	4,333,155,841	16

*Beban Persediaan
Rp1.392.123.520*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.392.123.520 dan Rp508.737.885 .

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

URAIAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	1,392,121,250	277,275,600	0
Beban Persediaan bahan baku	2,270	231,462,285	0
Beban Persediaan Lainnya			
Jumlah	1,392,123,520	508,737,885	0

*Beban Barang dan Jasa
Rp7.129.889.921*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp7.129.889.921 dan Rp321.541.697.510.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Penurunan Beban Barang dan Jasa terjadi karena KPU DKI Jakarta sedang tidak melaksanakan Pilkada. Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017*

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	4,591,126,520	321,194,693,560	(98.57)
Beban Langganan Daya dan Jasa	367,651,151	89,037,950	312.92
Beban Jasa Sewa	78,627,250	0	0
Beban Jasa Konsultan	44,658,000	0	0
Beban Jasa Profesi	134,900,000	34,500,000	291.01
Beban Jasa Lainnya	1,907,077,000	223,466,000	753.41
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	5,850,000	0	0
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah	7,129,889,921	321,541,697,510	(97.78)

*Beban
Pemeliharaan
Rp158.390.950*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp158.390.950 dan Rp24.758.929.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2018
dan per 31 Desember 2017*

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20,000,000	691,000	2794.36
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	138,390,950	24,067,929	475.00
Beban Pemeliharaan Lainnya	0	0	0.00
Jumlah	158,390,950	24,758,929	539.73

*Beban Perjalanan Dinas
Rp5.147.819.340*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2018 dan per 30 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.147.819.340 dan Rp710.973.583. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang berkurang seiring selesainya Tahapan Pilkada DKI Jakarta. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017*

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	368,485,540	182,629,924	101.77
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	369,670,000	78,560,000	370.56
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,318,170,900	424,166,659	918.04
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	91,492,900	25,617,000	
Jumlah	5,147,819,340	710,973,583	624.05

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada Masyarakat
Rp 0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Tidak erdapat Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017.

*Beban Bantuan
Sosial Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Tidak Terdapat Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017.

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp579.634.746*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp579.634.7456 dan Rp333.705.353.

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 Desember 2018	31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	579,634,746	333,705,353	73.70
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah Penyusutan	579,634,746	333,705,353	73.70
			-
Beban Amortisasi Software	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	579,634,746	333,705,353	73.70

*Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp4.385.116,-*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Tidak Terdapat Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp4.385.116 dan Rp0.

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp1.099.772.660,-*

D.11 Kegiatan Non Operasional

Terdapat Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.099.772.660 dan Rp276.507.970.

Pos Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas

Pos Luar Biasa Rp0

D.12 Pos Luar Biasa

Tidak Terdapat Pos Luar Biasa per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp689.809.599*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp689.809.599 dan Rp386.591.449.328.

*Defisit LO
Rp(18.208.509.575)*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp(18.208.509.575) dan Rp(325.300.619.959).

Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Penyesuaian Nilai
Aset Rp0*

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Tidak Terdapat Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp.0*

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Tidak Terdapat Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tanggal 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp.0*

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Tidak terdapat Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017.

*Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi (Rp.0)*

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 .

Koreksi Lain-Lain
Rp0

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Terdapat Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp0 dan (Rp59.063.603.574)

Transaksi Antar
Entitas
Rp22.207.720.259

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp22.207.720.259 dan (Rp1.537.416.196).

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(354,130,094)
Ditagihkan ke Entitas Lain	20,313,554,010
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	(1,556,416,157)
Pengesahan Hibah Langsung	3,804,712,500
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	22,207,720,259

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Transfer
Masuk/Transfer
Keluar
(Rp1.556.416.157)

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer keluar sampai dengan

tanggal 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017, sebesar (Rp1.556.416.157) dan (Rp6.328.237.121)

Jenis	Entitas Asal	Nilai
Peralatan dan Mesin	KPU DKI Jakarta	(1,556,416,157)
Aset Tak Berwujud	KPU DKI Jakarta	-
Persediaan	KPU DKI Jakarta	-
Jumlah		(1,556,416,157)

*Pengesahan Hibah
Langsung
Rp3.804.712.500*

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Barang dan Jasa Tahun 2018 adalah sebesar Rp3.804.712.500

Jenis	Entitas Asal	Nilai
Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Barang dan Jasa Tahun 2018	Bank BTN	3,804,712,500
		-
Jumlah		3,804,712,500

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Tidak ada Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung.

*Ekuitas Akhir
Rp4.689.020.283*

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp4.689.020.283 dan Rp689.809.599. Merupakan selisih antara asset dan kewajiban dalam satu periode.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor: **94/Kpts/Sesprov-010/Tahun 2018** Tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta **No: 25/Kpts/Sesprov-010/Tahun 2018** Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar , Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta :

1	Kuasa Pengguna Anggaran	Martin Nurhusin, S.H, M.M.
2	Pejabat Pembuat Komitmen	Saono,S.Sos
3	Pejabat Penandatanganan SPM	Farida, S.E, M.M.
4	Bendahara Pengeluaran	Tirto Sujati, A.Md

